

PAHLAWAN DI JALAN-JALAN

Oleh: Mahatmanto*



Gerbang Perbatasan

Apa yang hendak kita katakan bila berhadapan dengan peninggalan berupa gapura yang dibuat dari bahan batu bata merah seperti di karaton Cirebon dan makam Islam di Sendhangdhuwur ini? Tampilan visualnya mirip dengan gerbang yang disebut candi Bentar di Bali dan bangunan-bangunan yang dibina pada masa kerajaan Hindu Majapahit berkuasa di Nusantara.

Mengapa masing-masing ideologi [Islam dan Hindu] tidak punya representasi visual yang berkarakter, yang dapat dibedakan secara tegas satu dari lainnya? Mengapa ketika tatanan masyarakat berganti, tidak serta merta berganti pula representasi visualnya? Siapa sebenarnya aktor produktif yang tetap bekerja memberi tugas [sehingga menghadirkan tampilan visual yang mirip] di balik pergantian tatanan dalam masyarakat Jawa itu?

Mandala Baru Di Kota Lama

Menandai lokasi secara unik sudah lama dikenal manusia, namun konsep *alamat* atau *address* sebagaimana kita kenal sampai sekarang itu bermula dan berkembang dari proyek modernitas kartesian. Merekalah yang punya gagasan bahwa lokasi sesuatu dalam ruang harus ditandai secara unik dalam sistem koordinat kartesian yang 'netral'. Konsekuensinya, tiap jalan harus dipenggal-penggal dan masing-masing penggalan harus dikerat-kerat lagi di kiri-kanannya menjadi kapling-kapling bernomor urut. Dari peta kota Yogyakarta tahun 1925 kita masih bisa menjumpai banyak nama jalan dan daerah yang masih dapat kita kenali pada masa kini. Nama-nama lokal yang diberikan masyarakat setempat masih belum berubah. Beda halnya dengan kota-kota yang berada dalam administrasi kolonial Surabaya, Malang, Bandung, Jakarta- misalnya, umumnya memang kota Yogyakarta dan Surakarta sebagai daerah *vorstenlanden* terbebas dari intervensi pemerintah Kolonial dalam memberi nama suatu tempat. Sehingga bisa dipahami bila di kedua tempat itu masih dikenali cara-cara pramodern dalam memberi nama suatu daerah.

Cara masyarakat Jawa dalam mencirikan suatu wilayah adalah dengan mengaitkannya dengan nama penguasa setempat, atau kegiatan yang banyak dilakukan orang di wilayah itu, atau juga adanya *natural features* yang ada di situ. Namun, sejauh pengetahuan saya, penamaan itu tidak dikenakan pada jalan, tapi lebih sering pada area atau teritori tertentu. Banyak sekali jalan yang tidak bernama. *Purwodiningratan* [wilayahnya seorang penguasa yang bernama Purwadiningrat], *Patehan* [kawasan yang orang-orangnya bertugas membuat teh di Kraton], *Kemasan* [kawasan yang orang-orangnya membuat barang-barang dari emas], *Gayam* [daerah yang banyak ditumbuhi pohon Gayam], *Turen* [daerah yang banyak pohon

turinya], *Ngawi* [daerah yang banyak dijumpai rumpun bambu] dsb. itu lebih merujuk pada nama daerah katimbang nama jalur sirkulasi yang disebut jalan.

Konsep kekuasaan Jawa yang dibayangkan sebagai terang yang memancar dari satu sumber itu cocok divisualisasikan dalam *Mandala*. Mandala dapatlah kita anggap sebagai sistem koordinat yang menentukan mutu tiap lokasi yang diukur dari seberapa jauhnya dari pusat. Konsep ini memiliki anggapan dasar bahwa ruang yang kita huni ini tidak sama kepadatannya, tidak homogen mutunya tapi secara gradual turun atau naik mengikuti jarak terhadap pusat. Dan ini tidak berlangsung melulu di ruang linier yang bernama jalan tapi di semua titik di area yang dicakup oleh wilayah kekuasaannya.

Misalkan pun kita mengenal jalan-jalan yang diberi nama, jalan sebagai tempat pergerakan menuju ke suatu tempat lain itu oleh orang Jawa diberi nama dengan tujuannya itu. *Jalan Sala*, *Jalan Magelang*, adalah contoh nama-nama yang diberikan pada jalan yang menuju Sala, Magelang dsb. Cara memberi nama lokasi seperti ini sebenarnya jamak dilakukan orang di banyak kebudayaan pra modern karena persoalannya ada pada konsep ruang yang dianut tadi. Cara ini tidak unik Jawa. Ide untuk mencirikan suatu wilayah pada jalan dan bukannya pada area baru datang belakangan ketika modernitas dibawa masuk oleh pemerintah kolonial. Yakni ketika orang memisahkan ruang atas publik dan privat serta memandang ruang sebagai entitas homogen netral yang di dalamnya bekerja koordinat kartesian. Anggapan terakhir bahwa ruang itu homogen dan netral memperlakukan tiap titik lokasi bernilai sama sehingga cukup bila diwakili oleh nomor kapling saja.

Namun demikian, mutu ruang dalam bentangan kota sebenarnya tidak pernah homogen. Dari dulu hingga kini

pun ruang itu dapat dikenali gradasinya. Demikian pula dengan jaringan jalan pun dikenal hirarki atau tingkat-tingkat gradasinya. Pemberian nama pada suatu jalan, dengan demikian, juga akan menyertakan posisi nama itu dalam peringkat penghargaan masyarakat kota itu terhadapnya. Bila nilai penting suatu jalan itu bergeser peringkatnya, maka perlu penamaan baru yang cocok dengan statusnya. Jalan penghubung antara karaton lama Kartasura dengan karaton Surakarta dulunya adalah jalan raya kota Surakarta. Namun dengan dibangunnya jalan baru dari Kartasura ke benteng Vastenburg di depan karaton Surakarta, maka jalan yang pertama tadi pun merosot penghargaanannya. Jalan yang pertama sekarang dinamai sebagai Jalan Rajiman, sedang jalan baru tadi dinamai dengan nama tokoh militer asal Surakarta: Slamet Riyadi.

Studi mengenai perubahan nama-nama jalan di suatu kota sebenarnya sudah banyak dikerjakan orang. Benny Purbantano [1999], Josef Prijotomo [2002] maupun Sarkawi Husein [2005] telah menyumbangkan penelitian mengenai hal ini untuk kota-kota Surabaya dan Malang. Studi-studi itu sudah sangat mencukupi kita dengan informasi mengenai kapan dan mengapa terjadi perubahan nama jalan di kota-kota yang ditelitinya.

Ruang Publik Ruang Pahlawan

Ruang publik adalah kesempatan yang bisa diisi siapa saja yang berprestasi dalam komunitas, ruang ini juga merupakan representasi keunggulan komunitas yang dihormati oleh semua orang dan dijagai bersama-sama. Spatialisasi ruang publik ini di kota bisa berupa jalan, lapangan, atau pertemuan-pertemuannya.

Pemisahan antara ruang publik dan ruang privat itu adalah peristiwa drastis yang menentukan wajah perkotaan karena akan disusul oleh pengaturan distribusi, orientasi peletakan bangunan dan fasilitas. Semua ruang privat dihubungkan oleh jalur akses yang secara gradual bermuara di ruang publik yang makin besar. Sehingga ukuran jalan juga menjadi salah satu ukuran nilai penting fasilitas yang ada di sekitarnya.

Ruang publik ini jamak dinamai dengan nama individu yang telah berprestasi dalam komunitas, bisa juga dinamai oleh publik yang mungkin tidak bisa dikenali satu persatu pengambil

prakarsanya. Persoalan siapa yang menganggap nama ini lebih penting dari yang lain mewarnai perdebatan penamaan jalan di tiap kota. Ide untuk mengubah nama Jalan Darmo, Surabaya - yang sudah berkali-kali berganti nama- dengan nama Soekarno-Hatta menimbulkan polemik besar sebagaimana dilaporkan oleh Kompas, 5 April 2001 [Husain 2005: h.255].

Presiden pertama melanjutkan diskursus yang hangat mengenai Majapahit yang dianggap sebagai preseden dari Negara Kesatuan Republik Indonesia- memberi nama jalan-jalan sekitar Istana Negara dengan nama-nama Majapahit, Hayam Wuruk dan Gajah Mada.

Pada masa *Orde Baru* seluruh kota di Indonesia dikenai keharusan untuk memberikan ketujuh atau beberapa di antara nama petinggi militer yang tewas dalam kudeta 1965 sebagai nama jalan-jalan utama di tiap kota. Melekatkan nama pahlawan pada sepenggal jalan adalah kegiatan jamak yang dilakukan banyak kota. Pahlawan adalah orang disepakati secara publik sebagai individu berprestasi, yang setelah wafat perlu dihadirkan ulang sebagai ikon dalam nama-nama ruang publik kota. Pada masyarakat tradisional, pelanggungan pahlawan di tempat publik ini bisa dalam rupa pembangunan candi, menempatkan batu kubur di tengah-tengah. Di Indonesia, kebiasaan ini datang setelah pemerintah kolonial memulainya dengan memberi nama jalan, taman, jembatan dan fasilitas publik dengan nama-nama individu hebat atau pahlawan. Di Bandung nama arsitek *Hendrik Petrus Berlage* pernah menjadi nama jalan yang kemudian di masa kemerdekaan diubah menjadi Jalan Ciung Wanara yang lebih lokal. Nama-nama hebat di Nederlands-Indie seperti *Van Heutz*, *Idenburg*, *Daendels*, *Hoogendorp*, pernah menjadi nama jalan di Surabaya, yang pada masa Awal Kemerdekaan maupun Orde Baru menjadi berturut-turut Jalan Teuku Umar, Jalan Cokroaminoto, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan R.A. Kartini. Penggantian ini melulu mengganti nama pahlawan Pemerintah Kolonial dengan nama pahlawan Republik Indonesia.

Tabel yang diberikan Husain [2005: h.571] memberi gambaran menarik bahwa di Surabaya pernah terdapat nama-nama jalan Cina yang ketika masa kolonialisasi dan awal kemerdekaan masih dipelihara, tapi pada masa Orde Baru diganti sama sekali. Jalan Slomporet sekarang, dulunya bernama *Chinese Breestraat*; Jalan Simolawang Baru III sekarang, dulunya *Hongkongstraat*; Jalan Simolawan Baru IV dulunya *Tien Tjingstraat*; Jalan Cokelat sekarang dulunya *Tepekongstraat*





dan Jalan Kopi sekarang dulunya adalah *Tjaipostraat*; dst. Proses penggantian nama-nama Cina itu sendiri, menurut catatan Husain, berlangsung cukup lama sekitar 4 tahun. Artinya, proses itu tidak mudah. Ada suatu debat yang berlangsung di sekitarnya. Dikisahkan bahwa yang semula hendak digunakan adalah nama-nama Wali sebagai ganti, namun kemudian diubah menjadi nama-nama komoditas perdagangan [cokelat, kopi] yang asosiasinya dengan kegiatan perdagangan di kawasan itu lebih dekat. Demikian pula, menarik pula informasi mutakhir tentang nama-nama jalan di kompleks perumahan atau real-estate yang umumnya mengambil nama bunga dari pada nama pahlawan: Taman Anggrek, Bumi Anggrek, Bougenville, Cempaka, Dahlia dst.. Atau asosiasi ke Puri, Village, Bukit, yang semuanya memperlihatkan adanya tarikan untuk tinggal keluar dari pusat kota yang dikesankan sebagai masih bersih seperti taman bunga, atau alam perdesaan berbukit yang masih alami.

Kekuatan kapital para dari pedagang yang semakin diakomodasi dalam membentuk wajah kota ini semakin hari semakin kuat. Sejak pemerintahan Nederlands-Indie hingga melompat ke Orde Baru yang digerakkan oleh militer dan ekonomi kapitalis memungkinkan kekuatan modal yang anonim itu memberi wujud ruang perkotaan. Pemahaman kita tentang pahlawan ini tidak beda dari pemujaan pada seorang selebriti: orang yang karyanya telah melampaui kepentingan privatnya dan memberi kontribusi pada kepentingan publik. Kebiasaan seperti ini lagi-lagi bukan monopoli suatu orde tertentu saja.

Kebiasaan ini berlangsung di mana-mana dan di berbagai waktu. Pergantian orde di tempat kita, bila itu yang dimaksud adalah dari Nederlands-Indie ke Awal Kemerdekaan dan kemudian ke Orde Baru, tidak memberi tempat pada partisipasi penghuni kota dalam menentukan peruntukan dan penamaan fasilitas publik seperti jalan, taman, patung dan karya seni publik lain.

Keputusan yang berkenaan dengan ruang publik pun tidak ditangan para pemimpin masyarakat, namun lebih pada mekanisme ekonomi dan proses produksi karya seninya. Produksi seni rupa baik publik maupun bukan- lebih dimungkinkan karena ketersediaan alat, bahan, ketrampilan dan issue yang sedang berkembang di pasar. Di awal tulisan ini disajikan kasus yang berasal dari ranah seni bangunan atau

arsitektur, mengenai perubahan orde masyarakat yang tidak disertai penampilan visual yang berkarakter beda. Penjelasan yang tersedia adalah karena produksi seni bangunan itu tidak tergantung pada order dari orde yang berkuasa, namun pada alat, bahan dan ketrampilan yang tersedia di pasar, yakni dalam mengelola bahan batu bata.

Pada hemat saya, sepanjang modus produksi seni rupa itu tidak berubah, maka perubahan yang terjadi itu hanya berlangsung di permukaan, hanya pada pilihan tema atau obyeknya belaka. Seperti bergantinya nama pahlawan Belanda menjadi nama pahlawan Indonesia, atau nama internasional menjadi nama lokal.

Agaknya ini adalah kegamangan kita semua dalam menyiasati ruang publik dalam masyarakat kita. Suatu proses belajar dari awal.

Bahan Bacaan

Purbantano, Benny [1999] "Kecenderungan penamaan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya" dalam Jurnal Dimensi, Vol 27 no.1 Juli 1999. P.8-19.

Prijotomo, Josef [2002] "Lupa dan Kenang di dua sub-era modern kota Malang" dalam Gunawan Tjahjono dan Putu Ayu P. Agustiananda [eds.] Nyala Nirmana 72 tahun Dipl.-Ing Han Awal. Jakarta: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Husain, Sarkawi B. [2005]; "Sepanjang Jalan Kenangan: Makna dan Perebutan Simbol Nama Jalan di Kota Surabaya" dalam Freek Colombijn dkk.[eds.] Kota Lama. Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan. Yogyakarta: Penerbit Ombak; h. 255- 577.

Dinas Pertamanan Prop. DKI Jakarta;
<http://pertamanan.jakarta.go.id/utama/index.php>; akses Rabu,26/04/2006 9:09:29.
Lampiran

- A. Perubahan nama jalan di Surabaya, menurut catatan Sarkawi B. Husain [2005: h.]
- B. Perubahan nama jalan di Malang, menurut catatan Josef Prijotomo [2002]

**Mahatmanto*, staf pengajar di jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta.